

## Resistensi dalam Literasi: Mimikri dalam Kajian Poskolonialisme terhadap Palestina

**Idha Ismalia Rohmatika, Otong Sulaeman**

Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
STAI Sadra Jakarta  
e-mail : idhatika@gmail.com

### **Abstract**

*Palestine is the only nation in the world still experiencing physical occupation. In 1948, Israel was founded on the land of the Palestinian people by expelling the population and occupying the land they left behind. In facing the colonial situation, the Palestinians carried out resistance in various ways, including cultural resistance, and one of the models was artistic imitation or mimicry. This article aims to find the pattern of mimicry that occurs in Palestine using the postcolonial approach of Edward Said and the mimicry theory introduced by Homi Bhabha. This article concludes that some Palestinians consciously imitate Jewish and Israeli culture and literacy. The imitation effort was carried out as part of a strategy to gain independence.*

**Keywords:** *Israel, literacy, mimicry, Palestine, postcolonialism, resistance*

### **Abstrak**

Palestina adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang masih mengalami penjajahan secara fisik. Sejak tahun 1948, Israel didirikan di atas tanah bangsa Palestina dengan melakukan pengusiran terhadap warga dan pendudukan di atas tanah yang mereka tinggalkan. Dalam menghadapi situasi keterjajahan, bangsa Palestina melakukan perlawanan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan melakukan perlawanan budaya, dan salah satu modelnya adalah peniruan budaya atau mimikri. Artikel ini bertujuan untuk menemukan pola mimikri yang terjadi di Palestina dengan menggunakan pendekatan teori dan metode poskolonialisme Edward Said, serta teori mimikri yang diperkenalkan oleh Homi Bhabha. Artikel ini menyimpulkan bahwa sebagian orang Palestina, secara sadar, melakukan peniruan atas budaya dan literasi Yahudi dan Israel. Upaya peniruan

tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh kemerdekaan mereka.

**Kata kunci:** Israel, literasi, mimikri, Palestina, poskolonialisme, resistensi

## Pendahuluan

Palestina adalah satu-satunya bangsa di dunia yang hingga saat ini masih dalam kondisi keterjajahan. Posisi Palestina sebagai bangsa yang masih terjajah ini dinyatakan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika menyebut kawasan Palestina dengan istilah kawasan yang diduduki (*Occupied Palestinian Territory*) (ohchr.org, 2022). Pemerintah Indonesia juga menegaskan pandangannya tentang posisi Palestina sebagai bangsa yang masih terjajah ketika menyatakan bahwa negara-negara Asia Afrika hingga kini punya utang kepada bangsa Palestina karena bangsa tersebut hingga kini masih dalam posisi terjajah (Republika, 2015).

Palestina berada di kawasan Timur Tengah, yang dikenal kaya akan minyak bumi. Secara geografis, wilayah Palestina juga dipandang sangat strategis. Kawasan ini menjadi penghubung tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Sebagian ahli, kawasan yang strategis terkadang malah menjadi kutukan karena menjadi alasan bagi munculnya berbagai konflik perebutan kekuasaan. Konflik di Palestina menjadi rawan muncul gara-gara tempatnya yang strategis, alamnya yang kaya, serta diklaim sebagai kawasan lahirnya tiga agama besar dunia. (portal-ilmu.com, 2021). Otoritas Palestina hingga kini memiliki klaim atas kawasannya, yang meliputi Jerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza. Klaim inipun sebenarnya adalah sebuah langkah mundur sebagai akibat dari kekalahan bangsa Arab dalam perang tahun 1967. Sedangkan Israel hingga kini masih terus melakukan perluasan kawasan yang didudukinya dengan melakukan banyak sekali pembangunan permukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat (portal-ilmu.com, 2021).

Sebagaimana pola-pola yang lazim terjadi dalam kasus penjajahan, hubungan Israel sebagai penjajah dan Palestina sebagai bangsa yang terjajah tidak menunjukkan kesetaraan. Penjajahan Israel terjadi dalam aspek politik, budaya, maupun aspek sosial. Kasus pengusiran yang sudah terjadi sejak dideklarasikannya Israel di tahun 1948 juga salah satu contoh penindasan yang dialami bangsa Palestina. Inilah yang menjadi penyebab sangat banyaknya warga Palestina yang menjadi pengungsi sejumlah negara tetangga. Tentu saja, pilihan utama tempat pengungsian bagi Palestina adalah negara-negara tetangganya, yaitu sesama negara Arab. Hal itu karena Palestina memiliki banyak kesamaan budaya dengan negara-negara tersebut yang meliputi kesamaan adat istiadat, bahasa, sastra, agama, seni, cara berpakaian, hingga musik (Wardayati, 2021).

Sejak masa penjajahan atas Palestina dimulai tahun 1948 hingga kini, bangsa Palestina terus melakukan perlawanan dan resistensi. Perlawanan Palestina terhadap Israel dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai perlawanan sosial, politik, ekonomi hingga perlawanan bersenjata. Berbagai kajian telah dilakukan terkait dengan berbagai macam perlawanan bangsa Palestina atas penjajahan Israel tersebut. Hanya saja, ada satu jenis perlawanan yang sangat jarang dikaji, yaitu perlawanan dan resistensi budaya. Penelitian terdahulu yang menggunakan poskolonialisme dalam menganalisis keterjajahan bangsa Palestina masih sangat minim.

Artikel jurnal yang ditulis Hamdi (2017) menyimpulkan bahwa meskipun poskolonialisme dikemukakan oleh pemikir asal Palestina, yaitu Edward Said, namun kajian poskolonialisme terhadap Palestina masih minim karena adanya kontestasi sejarah, politik, geografis, sosial dan budaya dari semua bentuk ruang Palestina, termasuk dengan membungkam narasi Palestina. Buku yang ditulis Ball (2012) secara khusus menganalisis berbagai karya sastra dan film dari seniman Palestina, antara lain Liana Badr, Annemarie Jacir, dan Elia Suleiman, dengan menggunakan teori feminis poskolonial, untuk mengungkapkan lintasan kesadaran gender di tengah masyarakat Palestina. Sementara itu Basheer (2017) meneliti pendidikan kewarganegaraan poskolonial di Palestina dan Yordania, dan menyimpulkan bahwa globalisasi dalam kanon Barat memperkuat ideologi kolonialis melalui representasi penjajahan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di kedua negara itu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Said (1996), perlawanan budaya dilakukan dengan tujuan menegaskan identitas nasional, dan model seperti ini juga merupakan salah satu jenis perlawanan yang ditempuh bangsa-bangsa terjajah, dalam konteks poskolonialisme. Berdasarkan pemikiran Said ini, di dalam artikel ini akan dianalisis pola-pola mimikri yang terjadi di Palestina dengan menggunakan teori poskolonialisme Edward Said serta teori mimikri yang diperkenalkan oleh Homi Bhabha.

### **Resistensi dan Literasi**

Resistensi umumnya berupa gerakan karena memobilisasi kekuatan sosial dalam jangka panjang, menciptakan hubungan antara “kerangka waktu” dan tindakan kolektif (Grinberg, 2014: 54). Yang dimaksud dengan kerangka waktu adalah momen gerakan tersebut, di mana sebuah gerakan akan bergantung pada momennya. Momen mengacu pada jangka waktu antara intrusi awal ke ruang publik, ketika gerakan resistensi memobilisasi aksi kolektif dan berhasil membuat grup terlihat. Pada saat itu, identitas kolektif dan klaim-klaim mereka akan didefinisikan dan didiskusikan secara publik oleh komunitas sosial, aktivis, pemimpin opini, dan aktor politik (Grinberg, 2014: 54). Tujuan

dari gerakan resistensi adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perwakilan, memprotes kekuatan dominan dan keseluruhan sistem politik (Grinberg, 2014: 56).

Resistensi juga dapat berlanjut setelah sebuah negara merdeka secara *de jure*. Seperti ditulis Said, "...usaha untuk merestorasi komunitas dan mengembalikan kepemilikan budaya yang terus berlanjut lama setelah pembentukan *nation-states* independen secara politik. Resistensi dan dekolonisasi berlanjut setelah upaya nasionalisme berhasil dan berhenti." Resistensi itu, menurut Said, muncul antara lain dalam upaya sastra Afrika yang berhenti menggunakan bahasa Inggris dan mendalami bahasa Afrika (Said, 1996: 213).

Sementara itu, literasi, menurut Sulzby (1986), adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Menurutnya, secara praktis yang dimaksud dengan literasi adalah keterampilan dalam "membaca, berbicara, menyimak, serta menulis dengan cara yang berbeda, sesuai dengan tujuan" atau dengan kata lain, literasi merupakan keterampilan baca tulis ([fungsi.co.id](http://fungsi.co.id)). Literasi juga merupakan konsep yang merujuk pada praktik sosial yang menunjukkan hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Kualitas hubungan sosial dalam sebuah komunitas antara lain tergantung dari apa yang dibicarakan, serta bahasa dan diksi yang digunakan (Maine dan Vrikki, 2021:3). Literasi juga menjadi penting dalam konteks budaya sebuah masyarakat karena literasi merupakan salah satu aspek sangat penting dari budaya. Literasi menjadi identitas utama budaya sebuah masyarakat karena apa yang dibaca, dibicarakan, dan ditulis menunjukkan identitas budaya dari satu komunitas, bahkan identitas suatu bangsa.

### **Poskolonialisme dan Penjajahan Budaya**

Poskolonialisme adalah sebuah studi yang didasarkan kepada asumsi yang menyatakan bahwa era penjajahan fisik tidak menandai berakhirnya penjajahan negara-negara kolonial atas negara-negara koloninya. Menurut konsep ini, penjajahan terus berlangsung dalam bentuk penjajahan nonfisik dan nonmiliter, yaitu penjajahan ekonomi, sosial, dan penjajahan budaya. Edward Said dalam buku karyanya, *Orientalisme* mengulas adanya diri (*self*) dan liyan (*other*) yang merupakan dasar dari pemikirannya mengenai poskolonialisme. Dalam filsafat fenomenologi, liyan adalah cara yang dipakai oleh sekelompok manusia dalam mengidentifikasi sekaligus membedakan dirinya dari kelompok lainnya. Cara ini dipakai oleh kelompok tersebut dalam rangka memperoleh pengakuan bahwa mereka memang "ada". Dalam hal ini, liyan berbeda serta berlawanan secara diametral dengan diri (*self*). Konsep postkolonialisme Said didasari pada apa yang dia pandang sebagai "citra palsu Timur" atau "Timur yang dikarang oleh para penjelajah, penyair, novelis, filsuf, ahli teori politik, ekonom, dan

administrator penjajah.” Dalam narasi mereka (*self*, Barat), Timur digambarkan sebagai pihak liyan yang primitif dan tidak beradab (Hamadi, 2014:40).

Said menyatakan bahwa konsep liyan dan diri ini juga mengemuka dalam konteks poskolonialisme, di mana penjajah dan masyarakat terjajah bertautan dalam relasi diri dan liyan. Penjajah adalah diri, sedangkan masyarakat yang dijajah adalah liyan. Masyarakat terjajah hanya akan eksis dan diakui keberadaannya setelah terlebih dahulu dihubungkan dengan penjajahnya. Contoh yang sering dikemukakan mengenai *self* dan *other* (diri dan liyan) adalah konsep tentang kaum perempuan saat mengkonstruksikan eksistensi dirinya dengan cara menjadikan gender laki-laki sebagai parameter. Perempuan adalah liyan, yang baru bisa menunjukkan keberadaannya dengan cara menautkannya dengan eksistensi laki-laki. Perempuan sebagai kelompok manusia yang irasional, kompleks, dan sulit dimengerti, hanya akan diakui eksistensinya melalui laki-laki (Tong, 2010: 265-266).

Said memandang bahwa penjajah telah memaksakan bahasa dan budaya, sementara budaya, sejarah, nilai, dan bahasa masyarakat Timur telah diabaikan dan bahkan didistorsi oleh penjajah dalam upaya mereka untuk mendominasi dan mengeksploitasi kekayaan bangsa terjajah itu atas nama pencerahan, pembudayaan, dan pemanusiaan (Hamadi, 2014:40). Di dalam imperialisme akan terjadi pemaksaan-pemaksaan tertentu hingga tercipta kebergantungan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang dijajah. Dengan demikian, kajian poskolonialisme adalah upaya untuk mengungkapkan berbagai akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme di era pascakolonialisme. Kajian ini, menurut Said, sangat diperlukan untuk memunculkan kesadaran baru, yaitu sebuah kesadaran kritis dalam rangka menelusuri aspek-aspek tersembunyi atau yang dengan sengaja disembunyikan. Kajian ini akan mengungkapkan bagaimana kekuasaan itu bekerja, serta bagaimana setiap fenomena budaya pada masyarakat terjajah, di baliknya ada ideologi yang mendasarinya (Utami, 2012:809).

Salah satu konsep penting lain yang dikemukakan oleh Said dalam bukunya yang berjudul ‘Orientalisme’ adalah istilah ‘wacana kolonial’ dan hubungannya dengan identitas komunitas. Wacana kolonial bermakna wacana atau diskursus yang terkait dan dikembangkan oleh kolonialisme. Maksudnya, kolonialisme dan juga kelanjutannya (yaitu poskolonialisme) mengembangkan wacana atau sistem komunikasi, konsep berpikir, serta model budaya tertentu sebagai bagian dari upaya mengokohkan kekuasaan serta hegemoni penjajah atas jajahannya. Menurut Said, sejarah imperialisme dan kolonialisme modern menunjukkan bahwa Barat memunculkan dikotomi tentang orang Barat dan orang Timur yang di dalamnya terkandung konotasi superioritas identitas yang satu atas yang lain (Utami, 2012:809).

Barat terus melakukan konstruksi wacana dengan menempatkan Timur sebagai pihak yang inferior, sedangkan Barat adalah masyarakat yang dipastikan superior. Dengan cara ini, meskipun Dunia Timur sudah merdeka secara fisik dan militer, akan tetapi, Timur (atau lebih tepatnya lagi adalah non-Barat) tetap dalam kondisi terhegemoni. Melalui teori poskolonial tersebut, Said melakukan eksplorasi atas berbagai pengalaman bangsa-bangsa terjajah dan penindasan yang mereka alami. Said memandang bahwa perlawanan bangsa-bangsa terjajah dilakukan antara lain melalui budaya. Budaya, menurut Said, juga bisa digunakan untuk melawan kolonialisme itu, "...Sama seperti budaya dapat mempengaruhi dan secara aktif mempersiapkan satu masyarakat untuk dominasi dari pihak asing (*overseas domination*), budaya juga dapat mempersiapkan masyarakat untuk melepaskan atau memodifikasi gagasan dominasi dari pihak asing" (Said, 1994:200).

Menurut Said, wacana poskolonialisme memunculkan satu kesadaran pada masyarakat terjajah untuk meraih kemerdekaannya. Pemicu kesadaran ini adalah kolonialisme pada suatu kawasan tertentu yang berlangsung dalam waktu lama. Kolonialisme yang dimaksud tidak mesti berupa penaklukan secara fisik atau sesuatu yang nampak secara kongkrit. Penjajahan terhadap pikiran, jiwa, dan budaya juga dianggap sebagai bagian dari kolonialisme. Said mengemukakan konsep penjajahan pikiran (*colonizing mind*) yang dipakai oleh penjajah sebagai senjata utama untuk membuat bangsa terjajah agar tetap tunduk dalam kekuasaan penjajah serta berada dalam hegemoni mereka. Said mengemukakan konsep tersebut seraya menekankan perlunya suatu kesadaran agar bisa membaca keadaan tersebut (Utami, 2012:807).

### **Mimikri Sebagai Resistensi**

Homi Bhabha, seorang profesor di bidang sastra dan bahasa asal India di Harvard University, mengemukakan konsep 'mimikri'. Bhabha berangkat dari pemikiran dan definisi mimikri yang disampaikan oleh Lacan:

"Peniruan mengungkapkan sesuatu sejauh itu berbeda dari apa yang mungkin disebut dirinya yang berada di belakang. Efek mimikri adalah kamufase. . . bukan masalah menyelaraskan dengan latar belakang, tetapi melawan bintik-bintik latar belakang, menjadi berbintik-bintik - persis seperti teknik kamufase dipraktekkan dalam perang manusia." (Lacan, dalam Bhabha, 1994:85)

Secara umum, masyarakat terjajah berkecenderungan untuk menjadi inferior di hadapan kaum penjajah. Untuk itu, mereka akan melakukan peniruan atas budaya kaum penjajah agar mereka bisa mendekati dan mencapai kesetaraan dengan kaum penjajah. Upaya peniruan ini diberi istilah mimikri. Hanya saja, menurut Bhabha, upaya peniruan atau mimikri tersebut bisa menjadi kekuatan perlawanan. Dengan meniru dan

meminjam berbagai elemen budaya kaum penjajah, masyarakat terjajah malah akan mendapatkan kekuatan lain untuk melakukan perlawanan.

Sebagaimana ditulis Bhabha, mimikri kolonial adalah keinginan dari 'Other' yang dikenali, sebagai subjek yang berbeda, hampir sama tapi tidak sepenuhnya sama. Narasi mimikri dibangun melalui ambivalence yaitu, agar efektif, mimikri harus terus memproduksi sesuatu yang berbeda (*slippage, excess, difference*). Dengan demikian, menurut Bhabha, "*mimicry emerges as the representation of a difference that is itself a process of disavowal*" (mimikri muncul sebagai representasi dari perbedaan yang merupakan proses penolakan). Karena itu mimikri adalah tanda (*sign*) dari artikulasi ganda, yang merupakan strategi kompleks untuk menunjukkan kekuatan "Other" (Bhabha, 1994:86), dalam hal ini, si bangsa terjajah.

Mimikri memiliki aspek ambivalen, sebagaimana ditulis Bhabha:

"...mimikri tidak hanya memecah wacana, tetapi juga menjelma menjadi ketidakpastian yang menetapkan subjek kolonial sebagai kehadiran parsial. ... Seolah-olah kemunculan kolonial itu sendiri tergantung representasinya pada pembatasan atau larangan strategis dalam wacana otoritatif itu sendiri. Keberhasilan apropriasi kolonial tergantung pada proliferasi objek yang tidak tepat yang memastikan kegagalan strategisnya, sehingga mimikri adalah kemiripan sekaligus ancaman (Bhabha, 1994:86)."

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa peniruan tidak selalu menunjukkan kebergantungan yang terjajah kepada penjajah. Mimikri malah bisa menjadi salah satu strategi untuk menghadapi dominasi serta hegemoni penjajah. Mimikri menunjukkan keinginan dari suatu subjek untuk meniru subjek lain sehingga hampir sama, tetapi tidak sepenuhnya sama (*as subject of a difference, that is almost the same, but not quite*). Mimikri muncul sebagai representasi dari perbedaan, yang terlihat bersifat ambivalen. Ambivalen di sini terjadi karena, di satu sisi mimikri adalah suatu strategi yang rumit untuk menata kembali, mengatur ulang, mendisiplinkan, dan mencocokkan 'sang lain' (yang biasanya adalah musuh atau rival) sebagai visualisasi kekuatannya. Akan tetapi, di sisi lain, mimikri juga merupakan upaya untuk membedakan diri, upaya untuk melakukan perlawanan terhadap suatu konstruksi budaya yang secara alamiah melekat pada fungsi strategis dari kekuatan dominasi kolonial (Utami, 2012:813).

### **Resistensi Bangsa Palestina Melalui Budaya dan Literasi**

Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, selama puluhan tahun, bangsa Palestina terus mengalami diskriminasi tiada henti. Kebebasan dan hak mereka menjadi sangat terbatas. Berbagai laporan menunjukkan bahwa bahkan untuk kehidupan sehari-hari,

dalam rangka memenuhi keperluan hidup yang paling mendasar, warga Palestina selalu berada di bawah bayang-bayang ketidakamanan dan penindasan. Sebagai contoh, saat pergi ke tempat kerja, banyak orang Palestina di kawasan yang diduduki Israel, harus melewati pos pemeriksaan dan menghadapi ketidakpastian, apakah diperbolehkan lewat atau dipersulit dengan berbagai alasan. Untuk menghindari, mereka harus menempuh jalan panjang yang memutar. Jika melewati jalan utama, mereka berhadapan dengan resiko penahanan selama berjam-jam di pos pemeriksaan. Alasan yang dikemukakan petugas keamanan Israel selalu ada dan bermacam-macam, sehingga mereka bisa menangkap atau menahan warga Palestina manapun selama berjam-jam atas nama hukum. Misalnya, mereka menetapkan aturan kartu identitas bagi warga Palestina yang diberi nomor dan dengan warna tertentu. Lalu, para petugas keamanan itu menetapkan aturan bahwa hanya orang-orang dengan nomor tertentu yang diizinkan untuk keluar masuk melewati pos-pos pemeriksaan. Kadang-kadang, meskipun secara aturan tak ada pelanggaran, petugas keamanan di pos pemeriksaan tetap bisa menahan warga Palestina selama berjam-jam (Aini, 2021).

Sebagian orang menganggap bahwa resistensi bangsa Palestina baru dimulai dalam tiga atau empat dekade terakhir. Kesan tersebut muncul karena gerakan perlawanan yang secara eksplisit mengusung nama *muqawamah* (bermakna: resistensi) baru muncul di akhir tahun 80-an, tepatnya tanggal 14 Desember 1987. Pada tahun itu, para aktivis Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat mendeklarasikan organisasi ini, yang kemudian mereka beri nama *Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah*, disingkat HAMAS. Para pendirinya adalah aktivis Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Anggapan bahwa resistensi bangsa Palestina baru dimulai tahun 1987 tentu saja keliru. Faktanya, perang fisik antara Palestina melawan mandat Inggris yang memfasilitasi berdirinya Israel sudah terjadi pada tahun 1930-an. Pasca deklarasi Israel tahun 1948, perlawanan dan resistensi juga dimulai, tercatat bahwa pada tahun 1957, atau sembilan tahun setelah deklarasi, muncul organisasi perlawanan pertama dari kalangan Arab-Muslim Palestina yang bernama Harakah Tahrir Filistin, dan kemudian berubah menjadi Harakah *Al-Tahrir Al-Wathani Al-Filisthini*, dan dikenal hingga kini sebagai kelompok Fatah (Muchsin, 2015: 403)

Apa yang ditunjukkan oleh Fatah dan Hamas itu pada dasarnya adalah bentuk perlawanan atau resistensi. Gerakan mereka memenuhi kriteria yang dijelaskan oleh Grinberg (2014) dimana resistensi merujuk pada unjuk kehadiran yang dilakukan oleh kekuatan sosial yang ter subordinasi, dalam rangka mencari pengakuan dan representasi dalam proses pengambilan keputusan. Baik Fatah, Hamas, maupun gerakan-gerakan Palestina lainnya merupakan usaha kaum yang terjajah (ter subordinasi) secara

berkelompok melalui kehadiran mereka secara fisik demi meraih hak-hak politik dan kemerdekaan mereka.

Resistensi yang dilakukan bangsa Palestina dalam melawan penjajahan yang mereka alami, muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya dengan melakukan perlawanan budaya dan salah satu modelnya adalah peniruan budaya atau mimikri. Sebelum Israel menjajah Palestina, masyarakat Palestina menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa keseharian mereka. Bahasa Arab dipakai di semua kawasan Palestina, yang sebagian besarnya saat ini menjadi kawasan Israel. Bahasa Arab digunakan untuk memberi nama jalan, tempat dan kota. Namun, sekarang, bahasa Ibrani lah yang dipakai untuk memberi nama jalan, tempat, dan kota. Dengan demikian, identitas budaya Israel menjadi begitu dominan di berbagai kawasan Arab-Palestina. Total sekitar 7000 nama tempat Palestina telah di-Hebraized selama 125 tahun terakhir, termasuk lebih dari 5000 lokasi geografis, beberapa ratus nama sejarah, dan lebih dari 1000 nama pemukiman ([palestine-studies.org](http://palestine-studies.org)). Dengan demikian, literasi Palestina tak luput dari proses hegemoni yang berlangsung oleh kaum kolonial hingga sekarang ini, dan kemungkinan besar akan berlanjut selama penjajahan Zionis Israel atas Palestina masih terus berlangsung. Palestina yang menjadi satu-satunya bangsa yang masih mengalami penjajahan fisik di era poskolonial ini bisa disebut sebagai entitas yang paling merasakan wacana kolonial ini. Kepada mereka diterapkan wacana kolonial. Mereka terus menerus dibombardir dengan berbagai penindasan, diskriminasi, serta penggerusan identitas budaya, termasuk dalam hal literasi. Pola Barat-Timur dalam wacana kolonial sangat jelas terlihat pada pola hubungan Israel-Palestina.

Dihubungkan dengan literasi di Palestina, wacana kolonialisme menunjukkan fakta yang jelas, bagaimana literasi Zionis (dengan identitas utamanya berupa bahasa Ibrani) tampil lebih eksis dibandingkan dengan literasi bangsa Palestina (yaitu bahasa Arab), di tanah milik mereka sendiri. Bahasa Ibrani menjadi bahasa nasional yang wajib digunakan oleh bangsa Palestina sebagai pihak yang terjajah. Berbagai nama kota, tempat bersejarah, situs budaya, tempat peribadatan, hingga nama jalan diubah dengan semena-mena oleh Israel.

Sebuah reportase dari stasiun televisi Aljazeera menunjukkan bagaimana nama "Gerbang Damaskus" yang menjadi salah satu titik sentral demonstrasi damai para pemuda Palestina ternyata lebih dikenal dan lebih familiar dibandingkan dengan "Bab Al-Amud" sebagai nama Arab dari kawasan tersebut. Demikian juga dengan kota "Jerusalem" (dari bahasa Ibrani Urshalim) lebih terkenal dibandingkan dengan nama "Al-Quds." Ada banyak jalur masuk menuju kawasan Al-Quds yang memiliki nama Ibrani, seperti Gerbang Jaffa, Gerbang Santo Stephanus, Gerbang Baru, Gerbang Herodes, dan lain lain. Selain itu, Israel juga menghancurkan situs-situs bersejarah Palestina, misalnya

pada tahun 2019 Masjid al-Bahr di Tiberias dihancurkan Israel dengan tujuan dibangun museum. Penghancuran juga dilakukan melalui serangan bom. Dalam “Perang 51 Hari” tahun 2014, Israel membombardir Jalur Gaza dan menghancurkan 73 masjid. Di antaranya, Masjid al-Omari di Jabaliya, masjid kuno berusia lebih dari seribu tahun yang menjadi simbol keagungan Palestina di masa lalu. Praktik ini digunakan Israel untuk menghapus simbol-simbol sejarah keberadaan bangsa Palestina (Baroud and Rubeo, 2021).

### **Mimikri dalam Literasi Palestina**

Menurut Maine dan Vrikki (2021) konsep ‘literasi’ berubah dari waktu ke waktu, mulai dari harapan normatif terkait membaca dan menulis hingga pada konsep yang merujuk pada praktik sosial. Literasi merupakan salah satu unsur budaya dan menunjukkan hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Apa yang dibicarakan oleh seseorang, dengan siapa ia berbicara, dan diksi kata apa yang ia pilih, juga bahasa apa yang ia pergunakan, menjadi indikator yang paling mudah dan paling kuat terkait dengan kualitas relasi sosial seseorang. Relasi ini memunculkan dialog dan 'literasi budaya.' Maine dan Vrikki memberikan penjelasan bahwa literasi budaya ini terkait dengan “bagaimana individu melihat dunia, tempat mereka di dalamnya dan hubungan mereka dengannya” (Maine dan Vrikki, 2021:3).

Ketika terjadi literasi antarbudaya, terbuka pula “ruang dialog.” (Maine dan Vrikki (2021:4). Dengan kata lain, ketika dua bangsa berinteraksi, terjadi akulturasi budaya dan saling berbaurnya identitas. Dalam konteks penjajahan, interaksi yang berlangsung tidak bersifat setara, di mana kaum penjajah selalu superior di atas kaum yang dijajah. Karena itulah, proses penjajahan yang berlangsung dalam waktu lama biasanya menciptakan krisis identitas pada kaum yang dijajah. Dengan menggunakan konsep mimikri sebagaimana yang dikemukakan Homi Bhabha, dan juga pendekatan teori poskolonialisme Edward Said, penulis akan menganalisis literasi di Palestina, dimana ditemukan peniruan, namun sekaligus juga perlawanan.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa bangsa Palestina di masa sekarang menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan, sekaligus upaya peniruan budaya serta perpaduan antarbudaya (akulturasi). Antara lain terlihat, beberapa nama jalan, tempat, dan kota di kawasan Palestina tetap menggunakan bahasa Arab sebagai identitas bangsa Palestina. Contohnya adalah nama-nama seperti Bab Al-Mud, Al-Nassera, Nablus, Ariha, Al-Quds, Al Khalil. Akan tetapi, orang-orang Palestina juga mulai terbiasa menyebut sejumlah kawasan dengan istilah Ibrani, seperti Nzareth, Schechem, Jericho, Jerusalem, Hebron, dan lain-lain.

Gerakan awal untuk melakukan penjajahan dan hegemoni budaya, khususnya di bidang literasi, sudah dilakukan oleh Israel hanya setahun setelah mereka mendeklarasikan diri. Pada tahun 1949, Israel menggelar sebuah proyek nasional yaitu penyusunan peta kawasan versi mereka. Dalam proyek tersebut, berbagai nama tempat yang tadinya berbahasa Arab diubah dan diganti dengan nama-nama yang berasal dari bahasa Ibrani. Berbagai upaya “Yahudisasi” itu terus berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 2009, Menteri transportasi Israel di masa itu, Israel Katz, membuat “standarisasi” penamaan papan jalan di Jerusalem Timur dan beberapa bagian di Tepi Barat. Padahal, berdasarkan kepada berbagai keputusan hukum PBB dan juga perjanjian yang ditandatangani oleh para petinggi Israel sendiri, Tepi Barat adalah kawasan yang dihuni oleh orang-orang Palestina. Akan tetapi, Katz membuat keputusan sepihak yang isinya menyatakan bahwa papan nama di jalan harus dituliskan dalam tiga bahasa yakni Ibrani, Arab, dan Latin.. Akan tetapi, nama dalam bahasa Arab tersebut ternyata penulisan Arab dari bahasa Ibrani, bukan nama Arab aslinya.

Upaya mengganti nama-nama Arab menjadi Ibrani telah dilakukan sekitar 1 abad karena proses migrasi kaum Yahudi dari Eropa dimulai sejak abad ke-18, jauh sebelum Israel didirikan tahun 1948. Ada ribuan nama tempat Palestina telah di-Hebraized (diganti jadi nama Ibrani) selama 125 tahun terakhir, jumlahnya mencapai 7000 nama, termasuk lebih dari 5000 lokasi geografis, beberapa ratus nama sejarah, dan lebih dari 1000 nama pemukiman. Perubahan ini telah disetujui secara resmi oleh komite yang awalnya dibentuk untuk tujuan ini oleh Badan Yahudi pada tahun 1922 ([palestine-studies.org](http://palestine-studies.org)). Perubahan dan penggantian itu meliputi nama kota, desa, pemukiman, taman, jalan, sungai, mata air, dan berbagai tempat atau situs lainnya. Warga Palestina dipaksa untuk menggunakan bahasa Ibrani dalam kehidupan sehari-hari. Penggantian yang secara resmi telah ditetapkan secara sepihak oleh Israel itu mengubah perilaku budaya, yang tentu saja dilakukan oleh bangsa Palestina secara terpaksa. Dokumen pemerintah, peta, dan alamat rumah harus menggunakan bahasa Ibrani ([Plands.org](http://Plands.org)).

Pada tahun 2009, ribuan rambu jalan diubah oleh Israel dengan tujuan menghapus jejak-jejak bangsa Arab dari sebagian besar kawasan Al Quds. Misalnya, nama Jerusalem, atau “al-Quds” diubah menjadi bahasa Ibrani “Yerushalayim”; Nazareth, atau “al-Nasra” menjadi “Natzrat”; dan Jaffa, diubah menjadi “Yafo.” Nama-nama tokoh Zionis juga dijadikan nama jalan, antara lain, jalan raya utama di Lembah Yordan, yang melintasi wilayah Palestina tetapi digunakan oleh orang Israel untuk berkendara antara Israel utara dan Jerusalem, diberi nama “Jalan Gandhi.” Nama Gandhi adalah nama panggilan seorang jenderal Israel, Rehavam Zeevi yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari Israel Raya (Cook, 2009).

Langkah Israel ini membuat penduduk Palestina di Jerusalem Timur “tidak terlihat” dan ini merupakan salah satu bentuk penjajahan melalui literasi. Bentuk penjajahan literasi ini disadari oleh kaum Arab-Palestina dan mereka pernah melakukan perlawanan melalui upaya hukum. Sejak 1948, banyak rambu di jalan raya nasional hanya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Inggris. Namun atas tuntutan kaum Arab, pengadilan Israel pada tahun 1999 akhirnya setuju bahwa bahasa Arab harus disertakan dalam rambu-rambu itu. Tiga tahun kemudian pengadilan memutuskan bahwa bahasa Arab juga harus dicantumkan pada tanda-tanda di kota-kota di mana sejumlah besar orang Arab tinggal (Cook, 2009).

Tahun 1999 adalah masa-masa dimana upaya perundingan Oslo membawa harapan baru bagi kemerdekaan Palestina, tetapi kemudian kekuasaan politik Israel diambil alih lagi oleh faksi ultraradikal dan upaya Yahudisasi nama-nama jalan kembali dilakukan. Namun demikian, proses “Yahudisasi” bahasa di tengah bangsa Arab-Palestina telah dimulai jauh sebelumnya, yaitu sejak masa-masa sejak pengiriman kaum imigran Yahudi oleh organisasi Zionis Internasional. Karena itu, pengenalan bangsa Arab Palestina terhadap bahasa Ibrani juga dimulai jauh sebelum Israel dideklarasikan pada 1948. Antara lain, sejarah mencatat intelektual Palestina, Al-Khalidi, bergabung dengan para intelektual Jerusalem terkemuka lainnya di zamannya untuk pertama kali mengenal bahasa Ibrani di Aliansi Yahudi Israélite Universelle di Jerusalem—lembaga yang didirikan oleh orang-orang Yahudi Prancis pada pertengahan akhir abad ke-19 (Square, 2015).

Tokoh lain adalah Sa'id al-Husayni yang terkemuka di Jerusalem juga bersekolah dan kemudian menjadi birokrat Utsmaniyah, serta bekerja sebagai penyensor pers Ibrani di Palestina awal abad ke-20. Menurut surat kabar dua mingguan berbahasa Arab “Filastin” (1921), sejumlah keluarga Arab dari Hebron mengajukan petisi untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Yahudi sehingga mereka dapat mempelajari bahasa Ibrani. Serikat buruh Zionis pada tahun 1920-an dan 1930-an bernama Histadrut juga mengajarkan bahasa Ibrani pada malam hari kepada para pekerja Arab Palestina (Square, 2015).

Kemudian, setelah Israel didirikan 1948, bahasa Ibrani diajarkan secara resmi di sekolah untuk anak-anak Arab yang masih tinggal di kawasan Palestina yang dijadikan wilayah Israel. Dengan kata lain, Israel didirikan di atas tanah yang semula tanah Palestina, sebagian warga Palestina di wilayah itu diusir, tapi masih ada yang tetap tinggal dan menjadi warga Israel. Kaum Arab warga Israel ini kemudian ada yang melahirkan karya-karya sastra berbahasa Ibrani, misalnya Atallah Mansour yang menerbitkan novel dalam bahasa Ibrani, *Be-Or Hadash*, (Dalam Cahaya Baru), pada

tahun 1966. Setelah itu, banyak orang Arab-Palestina yang menerbitkan cerita pendek, novel, dan puisi dalam bahasa Ibrani (Square, 2015).

Seperti ditulis Snir, et.al. (1995), karya sastra orang Palestina di Israel memiliki karakter tema-tema oposisi dan perlawanan yang kuat yang berupaya melawan kontrol hegemoni kaum Yahudi Israel, baik secara politik maupun budaya. Terutama, perlawanan terhadap upaya kaum Yahudi Israel untuk menyerap kaum minoritas ke dalam budaya kolektif Ibrani. Sastrawan Palestina dalam bahasa Ibrani mulai mengemuka pada tahun 1980-an, dengan munculnya Naim Arayidi yang beragama Druze, dan Anton Shammas yang beragama Kristen.

Salah satu karya sastra Anton Shammas adalah novel berjudul *Arabesques*, yang ditulis berbahasa Ibrani, diterbitkan pada tahun 1986. Novel ini menceritakan kisah kehidupan kompleks orang Arab Palestina-Kristen di Israel. Karya ini mengungkap dunia pahit yang dijalani orang Kristen Palestina sebagai akibat dari dominasi budaya yang dilakukan Israel.



**Gambar: nama-nama jalan, petunjuk arah, serta nama gedung resmi yang menggunakan bahasa Ibrani, Inggris, dan Arab.**

Sementara itu, kaum Arab-Palestina yang berada di kawasan yang oleh PBB ditetapkan sebagai kawasan Palestina, masih terus mempertahankan bahasa dan budaya Arab-nya. Namun, muncul perubahan menarik pada tahun 2013, dimana organisasi perjuangan Palestina yang berkuasa di Gaza, Hamas, secara resmi mengajarkan bahasa Ibrani kepada anak-anak sekolah di Gaza. Fenomena tersebut merupakan bagian dari upaya perlawanan dengan model konstruksi budaya. Hamas memutuskan untuk memperbanyak pelajaran bahasa Ibrani di berbagai sekolah dengan tujuan agar di masa depan, para pemuda Palestina bisa menggunakan kemampuannya menggunakan “bahasa musuh” untuk berjuang melawan Israel. Bahkan, sebuah universitas yang dikelola oleh kelompok pro-Hamas dilaporkan telah membuka jurusan bahasa Ibrani (Hardoko, 2013).

Berbagai laporan menyatakan bahwa beberapa pejuang Hamas bisa berbahasa Ibrani dengan fasih. Hal itu bisa dilihat dari fakta bahwa dalam sejumlah bentrokan senjata yang pernah terjadi antara milisi Hamas dengan tentara Israel, Hamas berkali-kali memublikasikan video ancaman dan pesan radio yang ditujukan kepada warga Israel, dengan bahasa Ibrani. Dengan demikian, bahasa telah menjadi senjata dalam perang propaganda antara kedua belah pihak. Sayap militer Hamas telah mencuit dalam bahasa Ibrani selama konflik delapan hari pada bulan November. Sebaliknya, pihak berwenang Israel secara teratur mengirim pesan teks dalam bahasa Arab ke warga Gaza, dan menghujani wilayah itu dengan selebaran peringatan yang ditulis dalam bahasa Arab (Sherwood, 2013). Menurut pejabat senior di Kementerian Pendidikan Hamas, Soumaya al-Nakhala, pemahaman atas bahasa musuh bersesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia juga menyatakan bahwa dengan memperbanyak pelajaran bahasa Ibrani, pejuang Palestina bisa terhindar dari trik dan kejahatan Israel (Hardoko, 2013).

Soumaya al-Nakhala juga mengatakan, “Lebih baik mengetahui apa yang Israel pikirkan dan katakan daripada tidak tahu apa-apa. Kita harus tahu bahasa musuh kita – atau tetangga kita.” Warga Palestina lainnya, Ahmad al-Salihi mengatakan, “Penting bagi kami mengetahui bagaimana orang Israel berpikir tentang kami dan apa yang mereka katakan tentang kami di stasiun radio, saluran televisi, dan di surat kabar” (Jalal, 2015)

Meskipun disebutkan pihak Hamas bahwa tujuan pengajaran bahasa Ibrani ini adalah untuk ‘memahami bahasa musuh’, banyak orang Palestina yang memang terpaksa mempelajari bahasa penjajahnya itu karena tekanan ekonomi dan sosial. Banyak orang Arab Palestina yang terpaksa bekerja pada orang Israel, atau mengurus administrasi bisnis dengan pihak pendudukan (*occupying power*) sehingga bahasa Ibrani diperlukan sebagai media komunikasi. Selain itu, orang Palestina sangat sering menjadi korban pemenjaraan sewenang-wenang dan penahanan administratif dari pihak Israel sehingga upaya pembebasan membutuhkan negosiasi dan kemampuan berbahasa

Ibrani. Dengan demikian, terlihat ada dua fenomena yang terjadi bersamaan: di satu sisi, Israel (penjajah) memaksakan bahasanya kepada kaum terjajah (Palestina), dan sebaliknya, Palestina pun memahami pentingnya belajar bahasa Ibrani, demi kepentingan perlawanan.

Dengan menggunakan perspektif mimikri yang dikemukakan Bhabha, kita bisa menelaah lebih jauh mengenai literasi yang digunakan di Palestina. Menurut Bhabha, pada dasarnya, peniruan tidak menunjukkan kebergantungan pihak yang terjajah kepada penjajah. Peniruan bisa dimaknai sebagai permainan atas ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi. Dengan demikian, mimikri malah bisa menjadi salah satu strategi untuk menghadapi dominasi serta hegemoni penjajah. Seperti disampaikan oleh Bhabha bahwa strategi ini sifatnya ambivalen, dimana di satu sisi, mimikri seolah berkecenderungan melestarikan warisan budaya kolonial, namun di sisi lain mimikri juga bisa menegaskan dominasi penjajahan (Utami, 2012:806). Artinya, dihubungkan dengan Palestina, proses penggantian nama lokasi, juga pemaksaan penggunaan bahasa Ibrani untuk keperluan bisnis dan administrasi, menunjukkan dua sisi: pertama, ada ketundukan dari bangsa Palestina untuk meniru orang Israel dalam berbahasa, kedua, pemahaman bahasa ini justru bisa menjadi senjata mereka dalam melawan penjajahan.

### **Simpulan**

Israel sebagai kekuatan pendudukan (*occupying power*) telah melakukan upaya mengkolonisasi pikiran dan membuat jejak-jejak Arab semakin hilang dengan cara pemaksaan bahasa dan mengganti nama-nama kota, desa, jalan dan lokasi geografis lainnya ke dalam bahasa Ibrani. Pemaksaan penggunaan bahasa Ibrani terjadi melalui berbagai urusan administratif dan bisnis sehingga orang Palestina terpaksa mempelajari bahasa penjajahnya. Kondisi ini memunculkan mimikri atau peniruan, dalam hal ini orang Palestina bisa dipandang meniru budaya (dalam hal ini bahasa) penjajahnya. Dalam kajian poskolonial, mimikri adalah sebuah cara alamiah yang muncul sebagai reaksi atas situasi keterjajahan budaya. Kuatnya cengkeraman budaya penjajah yang mempengaruhi budaya lokal bisa dihadapi dengan melakukan peniruan atas budaya tersebut. Hal inilah yang terjadi dalam literasi Palestina, antara lain, munculnya karya sastra yang ditulis oleh orang Arab-Palestina dalam bahasa Ibrani dan tindakan struktural berupa pengajaran bahasa Ibrani di sekolah dan universitas Palestina. Dengan mempelajari bahasa Ibrani, orang Arab-Palestina bisa memahami cara berpikir musuh mereka, sehingga dapat melakukan perlawanan. Mereka juga bisa menyampaikan pesan secara langsung kepada musuh mereka, antara lain, terlihat dalam cuitan-cuitan ancaman dalam bahasa Ibrani, yang disampaikan oleh Hamas.

Mimikri dalam literasi Palestina akan terus bergulir tanpa henti, bersanding dengan menguatnya penyebaran informasi dari faksi dan aktivis Palestina. Hanya saja, karena mimikri pada dasarnya adalah sebuah bentuk perlawanan dan resistensi, watak ambivalen mimikri literasi yang dilakukan Palestina ini perlu diwaspadai. Perlu ada evaluasi terus menerus, supaya upaya mimikri tersebut jangan sampai menjadi kontraproduktif, membuat identitas bangsa Palestina menjadi kabur, dan, yang paling penting, jangan sampai menghambat upaya bangsa tertindas Palestina dalam meraih kemerdekaannya.

### Daftar Pustaka

- Aini, N. (2021). Kehidupan Warga Palestina Seperti Tahanan. *Republika* [online]. Dalam: <https://republika.co.id/berita/o1zh3z382/kehidupan-warga-palestina-seperti-tahanan> [Diakses 16 Oktober 2021].
- Ball, A. 2012. *Palestinian Literature and Film in Postcolonial Feminist Perspective*. New York: Imprint Routledge.
- Baroud, R. dan Rubeo, R. (2019). Israel's Judaisation of Palestine is Failing. *Aljazeera*, [online] Dalam <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/2/17/israels-judaisation-of-palestine-is-failing>. [Diakses 16 Oktober 2021].
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Basheer, A. (2015). Globalization or Colonization: Post- Colonial Civic Education in Palestine, Jordan, and the US. *Journal of Education & Social Policy*, Vol. 2, No. 5.
- Cook, J. (2009). Israel's plan to wipe Arabic names off the map. *Electronic Intifada*, [online]. Dalam: <https://electronicintifada.net/content/israels-plan-wipe-arabic-names-map/8351>. [Diakses 20 Juni 2022]
- Fungsi.co.id (t.t.). Pengertian Literasi: Tujuan, Manfaat, Jenis dan Prinsip! [online] Dalam <https://fungsi.co.id/literasi-adalah/>
- Grinberg, L.L. (2014). *Mo(ve)ments of Resistance: Politics, Economy and Society in Israel/Palestine 1931-2013*. Boston: Academic Studies Press.
- Handoko, E. (2013). Demi Perjuangan, Anak-anak Gaza Belajar Bahasa Ibrani. *Kompas*, [online]. Dalam: <https://internasional.kompas.com/read/2013/01/31/16393679/Demi.Perjuangan.Anak-anak.Gaza.Belajar.Bahasa.Ibrani> [Diakses 20 Juni 2022]

- Hamadi, L. (2014). Edward Said: The Postcolonial Theory And The Literature Of Decolonization. *European Scientific Journal*, Vol. 2.
- Jalal, R.A. (2015). Palestinians learning Hebrew for strategic advantage. *Al Monitor*, [online]. Dalam: <https://www.al-monitor.com/originals/2015/09/gaza-hamas-teach-hebrew-israel-conflict.html#ixzz7XSxBxKil> [Diakses 16 Oktober 2021].
- Muchsin, M.A. (2015). Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT* Vol. XXXIX No. 2.
- Hamdi, H. (2017). Edward Said, Postcolonialism and Palestine's Contested Spaces. *Journal of Holy Land and Palestine Studies*, Vol. 16, No. 1, hal. 7-25.
- Maine, F. dan Vrikki, M. (ed). (2021). *Dialogue for Intercultural Understanding Placing Cultural Literacy at the Heart of Learning*. Cham: Springer.
- OHCHR.org. (2022). <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/commission-inquiry-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem>. [Diakses 20 Juni 2022]
- Portal-ilmu.com. Profil Negara Palestina. [online] Dalam: <https://www.portal-ilmu.com/2021/07/profil-negara-palestina.html> [Diakses 16 Oktober 2021].
- Palestine-studies.org. Geographic Sites in Palestine: Arabic Names and Hebrew Denominations. [online] Dalam: [shorturl.at/exSWZ](https://shorturl.at/exSWZ) [Diakses 16 Oktober 2021].
- Republika. (2015). Jokowi: Asia-Afrika Masih Miliki Utang kepada Palestina. [online]. Dalam: <https://www.republika.co.id/berita/nn50w5/jokowi-asiaafrika-masih-miliki-utang-kepada-palestina>. [Diakses 20 Juni 2022]
- Said, E.W. (1996). *Culture and Imperialism*. New York: Vintage Books.
- Hebrew As the Language of Grace": Arab-Palestinian Writers in Hebrew
- Snir, Reuven, 'Awda, M. dan Snir, R. (1995). "Hebrew As the Language of Grace": Arab-Palestinian Writers in Hebrew. *Prooftexts*, Vol. 15, No. 2, hal. 163-183.
- Square, P. (2015). The Untold Story of Palestinians Who Learned Hebrew. *Institute for Palestine Studies*, [online]. Dalam: <https://www.palestine-studies.org/en/node/232346> [Diakses 20 Juni 2022]
- Sherwood, H. (2013). Hamas puts Hebrew on the curriculum for the first time in 20 years. *The Guardian*, [online]. Dalam: <https://www.theguardian.com/world/2013/feb/13/hamas-puts-hebrew-on-curriculum>. [Diakses 20 Juni 2022]

Tong, R. P. (2010). *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra.

Utami, S. (2012). Mimikri Dalam Kuliner Indonesia Melalui Kajian Poskolonial. Prosiding The 4 th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future"

Wardayati, T. (2021). Budaya Palestina Yang Banyak Dipengaruhi Negara-Negara Tetangganya. *Intisari* [online]. Dalam: [tinyurl.com/498uu2cj](http://tinyurl.com/498uu2cj) [Diakses 16 Oktober 2021].